



Pj Gubernur Dorong Terwujudnya Pelaporan Keuangan Akuntabel dan Terpercaya

Pemprov, Bhirawa

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono bersama Walikota dan Bupati se-Jawa Timur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023, ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (5/3).

Didampingi Plh Sekdaprov Jatim Bobby Soemiarsono, Pj Gubernur Adhy menyerahkan LKPD TA 2023 Unaudited kepada Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dan Kepala Perwakilan BPK RI Jatim Karyadi.

Dalam sambutannya, Adhy secara khusus mendorong kepala daerah baik Bupati/Walikota serta Pj Bupati/Pj Walikota untuk mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan terpercaya.

“Kami berharap seluruh Kepala Daerah baik di Kota/Kabupaten untuk bisa melaksanakan seluruh program dan penyelenggaraan daerah dengan baik, juga dibarengi dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya,” katanya.



Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono bersama Walikota dan Bupati se-Jawa Timur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023.

Adhy mengatakan, LKPD menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas. Untuk itu, laporan ini bisa dianalisis dan dievaluasi untuk melaksanakan perencanaan berikutnya.

“Sehingga mana yang belum selesai maka harus diperbaiki, termasuk jika ada temuan-temuan. Laporan ini ke depannya sangat berperan

untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan menyejahterahkan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan good governance penting untuk dipahami bersama. Tahun lalu Pemprov Jatim telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini juga diraih untuk seluruh kabupaten/kota di Jatim. Adhy menegaskan bahwa prestasi ini

harus dipertahankan.

“Kita sudah bertekad, berikutnya kita akan bersama-sama serentak menerima WTP. Semua akan melakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga seluruh entitas di Jatim ingin mendapatkan peningkatan nilai. Mudah-mudahan indikator penilaiannya juga tidak meningkat lagi,” ucapnya.

Setelah penyerahan LKPD unaudited, maka tahap selanjutnya ialah akan dilaksanakan pemeriksaan terinci. Pihaknya berkomitmen seluruh elemen di Jatim akan kooperatif dan bekerjasama guna dikonfirmasi dalam menghasilkan pemeriksaan yang terperinci.

“Maka Tim pembuat laporan keuangan di Kab/Kota harus siap untuk dikonfirmasi guna pemeriksaan. Kami juga akan mendukung kegiatan pemeriksaan terinci itu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Adhy

juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama berkomitmen menjaga stabilitas perekonomian dan pangan jelang Bulan Suci Ramadhan. “Ini sudah menjadi kebiasaan bupati/walikota untuk turun lapangan cek ke pasar-pasar dan ke gudang Bulog. Kita juga ada instrumen kebijakan khusus dalam mengambil langkah strategis dalam menjaga kestabilan harga barang khususnya bahan pokok juga harga BBM,” tandasnya.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit juga tak luput untuk mengapresiasi penyerahan LKPD TA 2023 Unaudited di Jatim yang dilakukan secara serentak.

“Hanya Jatim yang melaksanakan kegiatan penyerahan LKPD secara serentak. Ini penting diapresiasi, karena ini sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Keserentakan ini hanya terjadi apabila koordinasi berjalan dengan baik dan berjalan bersama-sama,” ucapnya. [iib]